

PERANAN INDONESIA DALAM RANGKA TURUT MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA

Oleh: Harry Purwanto

I. PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II masyarakat internasional selalu berharap dunia bisa kembali tenang, aman dan penuh saling pengertian. Umat manusia sangat mendambakannya, karena mereka merasakan betapa menderitanya akibat perang yang mencekam seluruh dunia itu, baik langsung atau tidak langsung, umat manusia mendambakan perdamaian dan persaudaraan agar mereka dapat leluasa melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan hidup. Sebab dunia tanpa damai abadi, tidak menguntungkan pembangunan yang berkesinambungan bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan lahiriah dan batiniah yang semakin meningkat di dunia (Lukito Santosa, 1986:6).

Damai atau *tertib dalam ketentraman* atau *tata tentrem kerta raharjo* (istilah dari Lukito Santosa) adalah suatu kata-kata yang mudah diucapkan, enak didengar, namun satu hal yang sulit untuk menciptakan atau mencapai. Sementara itu masih ada anggapan bahwa perdamaian adalah suatu hal yang abstrak atau akademik belaka sifatnya, karena jalannya teramat panjang

dan berliku-liku.

Perdamaian, sebagaimana dilukiskan oleh Saint Augustinus, yang tidak mengkaitkan sebagai acuan antitesis dari peperangan adalah *tata tertib dalam ketentraman* (Daud Yusuf, Analisis No. 1 tahun 1989, hal. 6). Demikian juga *Perdamaian* dalam gambaran yang negatif adalah suatu kondisi tiadanya perang/-konflik, ketegangan dan huru-hara dalam skala besar, sistematis dan kolektif. Pengertian hakiki yang dilawankan dengan perdamaian adalah kekerasan. Dewasa ini, yang disebut kekerasan bisa berbentuk struktural, kultural atau ekologi. Kemiskinan dan pengangguran, secara definisi adalah salah satu bentuk kekerasan struktural. Demikian pula rasisme, seksisme, intoleransi agama, dominasi sosial-budaya atau alienasi adalah manifestasi kekerasan kultural. Pengrusakan sumber-sumber alam tanpa menghiraukan kelestariannya, polusi dan radiasi atom atau nuklir, juga merupakan perwujudan kekerasan. Kesemuanya itu tidak hanya merupakan sumber dan penyebab kekerasan fisik langsung yang berupa konflik atau perang, melainkan merupakan

lawan dari kondisi damai. (Prisma No. 9, tahun 1986, hal. 2). Adanya perbedaan dalam sejarah, kebudayaan, adat istiadat, agama, bahasa, perekonomian, ideologi, politik, geografis dan berbagai peradaban lainnya yang dimiliki oleh setiap bangsa, adalah penyebab timbulnya permusuhan atau kecurigaan antar bangsa.

Dari konsep perdamaian tersebut, maka dapatlah dikatakan, bahwa ternyata bukan hanya ada atau tidaknya perang yang berpengaruh pada suatu situasi damai. Ingat pepatah *peace is not just an absence of war*. Situasi damai bukan hanya sekedar suatu situasi di mana perang dan konflik atau bahaya perang dan konflik atau bahaya perang dan konflik tidak ada. Bahkan dengan perang merupakan salah satu sarana untuk menciptakan perdamaian. Perang hanya merupakan salah satu faktor tidak terciptanya suasana damai dalam masyarakat. Walaupun dalam masyarakat diakui juga, melalui pepatah bahwa "*bila anda menghendaki perdamaian siapkanlah perang (Si vis pacem para bellum)*".

Sering terjadi bahwa, perang atau sengkata antar negara baru dapat diakhiri dengan bantuan atau hadirnya pihak ketiga, sebagai pihak penengah. Oleh karena itu adanya pihak penengah dalam masyarakat bangsa-bangsa sangat diperlukan. Pihak penengah tersebut dapat berupa sebuah negara yang menganut prinsip *netralisme* atau juga *non-alignment*, dan dapat juga

berupa organisasi internasional. Sebab perdamaian bukanlah hanya monopoli suatu bangsa tertentu saja, tetapi suatu keadaan yang selalu diimpikan oleh setiap umat manusia, negara (seperti Indonesia), bahkan PBB, sebagai suatu organisasi internasional yang terbesar dewasa ini. Namun keberhasilan suatu organisasi internasional sebagai penengah dalam setiap ketegangan atau konflik dalam masyarakat bangsa-bangsa, perlu mendapat dukungan yang positif dari para anggotanya. Organisasi internasional hanya sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengubah hubungan negatif antar negara menjadi hubungan positif.

Republik Indonesia lahir di tengah-tengah masyarakat internasional melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa tahun setelah kemerdekaan, masih diwarnai oleh adanya revolusi fisik, yang menyebabkan negara baru tersebut tidak dapat turut ambil bagian dalam mewujudkan perdamaian dalam masyarakat internasional. Perhatian Bangsa Indonesia masih tertuju pada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena kemerdekaan mempunyai arti yang amat penting bagi suatu negara. Kemerdekaan sebagai landasan pertama untuk mengembangkan hubungan antara negara, atas dasar persamaan hak dan persamaan derajat. Paham bangsa Indonesia tentang perdamaian, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih cinta

pada kemerdekaan.

Demikian pentingnya arti kemerdekaan, maka Bangsa Indonesia menempatkan Kemerdekaan sebagai kepentingan yang pertama pada alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan menjadi hak setiap bangsa. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penjajahan di atas dunia, oleh karena itu penjajahan tersebut harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian kemerdekaan oleh bangsa Indonesia digunakan sebagai dasar pertama untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. (alinea 4 Pembukaan UUD 1945).

Dalam tulisan ini, pengertian Perdamaian dipersempit, yaitu ditekankan pada terciptanya situasi damai dalam masyarakat internasional disebabkan tidak adanya sengketa antar negara. Sehingga dalam tulisan ini akan diutarakan peranan Indonesia dalam turut menciptakan perdamaian dunia, dalam kaitannya mencegah atau membantu menyelesaikan sengketa antar negara.

II. KONSEP PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PBB

PBB sebagai organisasi internasional universal, lahir di tengah-tengah masyarakat internasional sekitar 45 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Oktober 1945. Tanggal tersebut merupakan awal berlakunya Piagam PBB, setelah diratifikasi oleh lima negara besar dan sejumlah mayoritas negara-negara

anggota lainnya. Juga tanggal tersebut, melalui Sidang Majelis Umum tanggal 31 Oktober 1945 dinyatakan sebagai "*Hari PBB*" atau "*United Nations Day*".

PBB dibentuk untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (*maintaining international peace and security*) atau sering dikenal *peace keeping*. Negara-negara anggota PBB (yang kini berjumlah kurang lebih 154 negara) telah bersepakat untuk melaksanakan tujuan PBB tersebut. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Mukadimah Piagam PBB sebagai berikut:

"Kami rakyat Perserikatan Bangsa Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi yang mendatang dari bencana perang, yang selama hidup kita telah dua kali menimbulkan kesengsaraan yang tiada taranya bagi umat manusia dan

untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat diri manusia, pada persamaan hak, baik bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan untuk menegakkan keadaan, di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara dan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut harus ditempuh melalui 4 langkah, yaitu:

melaksanakan toleransi dan hidup bersama satu sama lain dalam suasana perdamaian sebagaimana layaknya hidup bertetangga baik, dan

mempersatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menjamin, dengan menerima prinsip-prinsip dan dengan menjelmakan metoda-metoda, agar kekuatan senjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, dan menggunakan sarana-sarana internasional guna mempertinggi kemajuan ekonomi dan sosial semua bangsa.

Kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa sebagaimana terdapat dalam Mukadimah Piagam PBB tersebut, dapat juga dijumpai dalam pasal 1 Piagam PBB, yaitu:

1. memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian;
2. mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal;
3. mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; dan
4. menjadi pusat bagi penyalarsan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa

dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Atau secara singkat dapatlah dikatakan bahwa tujuan pokok PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam memberikan banyak kemungkinan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Bahkan dalam mengemban tujuan tersebut, PBB menetapkan tahun 1986 sebagai Tahun Perdamaian, dengan maksud supaya manusia teringat kembali pada komitmen membina perdamaian.

Bila diperhatikan, usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut mencakup 3 macam usaha yang berbeda-beda. Pertama: harus ditujukan kepada *removal* atau menghilangkan sebab-sebab ketegangan dan pertikaian. Kedua: harus ditujukan kepada *peaceful settlement*, yaitu apabila penyelesaian secara damai situasi di mana usaha pertama gagal, dan apabila ketegangan menggantung menjadi pertikaian senjata. Usaha kedua inipun menurut pasal 33 Bab VI harus diusahakan secara bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang, agar supaya jangan sampai pertikaian senjata antara yang bersengketa itu menjalar sehingga "*likely endanger the maintenance of peace and security*". Usaha ketiga: yaitu rangkaian "*enforcement measures*" atau tindakan-tindakan paksa, yang dimulai dengan tindakan ekonomi, yang kemudian dapat ditingkatkan men-

jadi tindakan militer. (Roeslan Abdulgani, 1972:40-41).

Dalam tubuh PBB, dari keenam organ utama yang dibentuk, hanya 3 organ utama yang secara langsung mempunyai tugas untuk turut memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jendral. Wujud dari pelaksanaan tugas organ itu adalah sebagai berikut:

A. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab paling utama di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Piagam PBB. Pasal 24 Piagam PBB menentukan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif dari PBB, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka (pasal 24 ayat 1).

Jadi berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara telah menyerahkan sebagaimana kedaulatannya secara sadar ke Dewan Keamanan, namun dalam bertindak Dewan Keamanan tetap harus membawakan aspirasi negara-negara anggota. Sebab Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya tetap

atas nama semua negara anggota PBB, bukan semata-mata untuk kepentingan negara-negara anggota Dewan Keamanan sendiri. Prinsip semacam ini yang memang sering menimbulkan persoalan dalam prakteknya. Banyak persoalan tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Keamanan, hanya semata-mata kepentingan dari salah satu atau beberapa anggota Dewan Keamanan (khususnya anggota tetap DK) tidak terpenuhi. Seperti misalnya adanya Veto dari Uni Sovyet dalam masalah Afganistan tahun 1980, adanya Veto dari Inggris dalam masalah Malvinas tahun 1982 dan sebagainya.

Selanjutnya dalam Piagam juga ditentukan bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan asas-asas PBB. (pasal 24 ayat 2). Ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Dewan Keamanan dalam tubuh PBB. Dewan Keamanan hanya merupakan salah satu organ utama, dalam struktur organisasi PBB, dan harus menjalankan tugas yang harus diemban oleh organisasi dunia ini.

Dalam Piagam PBB terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai oleh Dewan Keamanan dalam rangka menjalankan tugasnya. Beberapa cara ke arah pencapaian tujuan tersebut pada prinsipnya berupa tindakan kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian dalam bentuk apapun, yang antara lain:

- 1) Mengadakan penyelesaian-penyelesaian secara damai (pasal 33). Seperti yang pernah dilakukan terhadap Indonesia pada waktu terjadi sengketa dengan Belanda tahun 1949. Dalam hal ini Dewan Keamanan bertindak sebagai pemberi jasa baik (good offices). Dalam masalah persetujuan Gencatan Senjata di Timur Tengah, Dewan Keamanan memberi kuasa kepada personil Truce Supervision Organization (organisasi pengawas gencatan senjata). Di Kongo dan Siprus Dewan Keamanan memberi kuasa kepada pasukan pemelihara perdamaian.
- 2) Tindakan-tindakan yang tidak termasuk penggunaan kekuatan senjata (pasal 41).
- 3) Maupun tindakan-tindakan militer atau tindakan kekerasan tertentu (pasal 42). Seperti pengiriman pasukan perdamaian pada sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan tahun 1950, Sengketa di Kongo 1960 (Indonesia turut ambil bagian), persengketaan di Timur Tengah, Sengketa Afganistan dan sebagainya.

Dalam pemakaian angkatan bersenjata tersebut Dewan Keamanan PBB dibantu oleh Komite Staf Militer (Military Staff Committee). Komite staf militer ini bertugas memberi nasihat dan bantuan kepada Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bantuan militer Dewan Keamanan. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan.

(pasal 47 Piagam PBB).

Satu hal yang perlu diingat, bahwa PBB melalui Dewan Keamanan bukan merupakan suatu organisasi untuk menciptakan perdamaian, tetapi hanya memelihara perdamaian. Sebagai pencipta perdamaian sebenarnya adalah mereka yang memenangkan perang. Dewan Keamanan tidak diminta untuk berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan penciptaan perdamaian setelah perang, seperti pembagian wilayah dan sebagainya. (James Barros, 1984:19).

B. Majelis Umum.

Walaupun di atas dikatakan bahwa Dewan Keamanan diberi tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 24), namun tidak berarti bahwa Dewan Keamanan adalah satu-satunya organ yang mempunyai tugas dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Piagam juga memberi kuasa kepada Majelis Umum untuk mendiskusikan "prinsip-prinsip pengawasan pembatasan persenjataan", serta membuat rekomendasi-rekomendasi kepada negara anggota dan kepada Dewan Keamanan atau kedua-duanya, untuk memperhatikan adanya gangguan atas perdamaian dan keamanan internasional. Namun pemberian wewenang kepada Majelis Umum ini lebih bersifat umum dan kurang bersifat memaksa.

Berdasarkan pasal 10 Piagam, Majelis Umum berhak mendiskusikan

kan dan mengeluarkan resolusi, tidak hanya yang berhubungan dengan kekuasaan atau tugas sebagaimana tercantum dalam Piagam, tetapi juga terhadap masalah-masalah yang berada dalam jangkauan ruang lingkupnya, seperti yang bersifat politik, ekonomi, kebudayaan, masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia, sepanjang masih dalam batas-batas yang diatur dalam Piagam.

Pemberian wewenang Majelis Umum tersebut, berdasarkan keinginan dari negara-negara kecil dalam konferensi San Fransisco; yang menghendaki supaya masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional tidak hanya menjadi monopoli Dewan Keamanan, di mana kelima anggota tetapnya memainkan peranan yang sangat berpengaruh. (James Barros, 1984:79).

Wewenang yang diberikan kepada Majelis Umum tersebut kemudian dipertegas dalam pasal-pasal 11, di mana majelis dapat mempertimbangkan asas-asas umum yang berkaitan dengan kerjasama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (ayat 1), juga dapat membicarakan setiap persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (ayat 2) dan Majelis Umum dapat minta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaan yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (ayat 3).

Satu hal yang harus diperhatikan yaitu walau Majelis Umum di-

beri wewenang untuk turut serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tindakan dari Majelis Umum tersebut dibatasi oleh ketentuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pembatasan yang bersifat umum, adalah bahwa tanggung jawab utama pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tetap ada pada Dewan Keamanan (pasal 24). Sedangkan pembatasan khusus adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 12, bahwa Majelis Umum dilarang mengajukan anjuran yang berkenaan dengan perselisihan atau keadaan, sementara Dewan Keamanan sedang menjalankan kewajiban sesuai dengan Piagam.

Dari kewenangan Majelis Umum dalam turut memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yang dirumuskan secara umum dalam Piagam PBB, namun dalam perkembangannya justru memperbesar peranan Majelis Umum dalam menciptakan dan turut serta dalam pembuatan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini terjadi karena sering Dewan Keamanan tidak berhasil dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang ditentukan dalam Piagam. Perkembangan penggunaan Majelis Umum yang demikian itu mencapai puncaknya pada tahun 1950, yaitu dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum tanggal 3 Nopember 1950 No. 337 (V), yang dikenal dengan "*Uniting for Peace Resolution*" atau "resolu-

si bersatu untuk perdamaian" (Analisa, 1983-2). Dengan *Uniting for Peace Resolution* tersebut memperkuat Majelis Umum sebagai agen utama untuk mengkoordinasikan keamanan bersama. Ada lima ketentuan penting dari resolusi tersebut yaitu:

- 1) Bahwa Majelis Umum dapat ber-sidang dalam waktu 24 jam, jika Dewan Keamanan dihalangi veto untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya bagi perdamaian dan keamanan internasional,
- 2) Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi pada negara anggota untuk tindakan bersama, termasuk penggunaan angkatan bersenjata,
- 3) Sebuah rekomendasi, bahwa tiap negara anggota memelihara dalam angkatan bersenjata nasionalnya kesatuan-kesatuan yang secara cepat dapat dipakai untuk melaksanakan tugas sebagai pasukan PBB,
- 4) Pembentukan Komisi Pengawas Perdamaian untuk mengamati dan melaporkan di wilayah manapun ada ketegangan internasional,
- 5) Penciptaan Komite tindakan bersama untuk mempelajari dan melaporkan tentang cara dan sarana memperkuat perdamaian dan keamanan internasional menurut Piagam PBB. (Dahlan Nasution, 1984:152-153)

Banyak negara yang akhirnya menyerahkan persoalannya ke depan Majelis Umum, karena dalam kenyataannya bila persoalan terse-

but dibawa ke depan Dewan Keamanan terhalang oleh adanya veto dari negara yang termasuk dalam The Big Five. Seperti ketika Majelis Umum pada tahun 1956 turut serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam penghentian tembak menembak di Terusan Suez pada bulan Nopember 1956, yang meliputi Israel, Mesir, Prancis dan Inggris. Di mana masalah itu setelah di veto di Dewan Keamanan, yang akhirnya Majelis Umum mengadakan sidang darurat pada bulan Nopember 1956 atas permintaan 7 orang anggota Dewan Keamanan. (Starke, 1984:610). Demikian juga pembicaraan Afganistan pada tahun 1980 di Dewan Keamanan yang mendapat veto dari Uni Sovyet, yang akhirnya pembicaraan dialihkan ke Majelis Umum.

Resolusi Majelis Umum yang dikenal dengan *Uniting for Peace Resolution* tersebut merupakan peralihan tugas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dari Dewan Keamanan ke Majelis Umum, sebagai pemenuhan tanggung jawab yang tersisa "*residual responsibility*", yang dibebankan kepada masing-masing negara yang semuanya duduk di dalam keanggotaan Majelis Umum PBB (Nasri Gustama, Analisa 1983-2).

Meskipun sebagian besar keputusan yang dibuat oleh Majelis Umum tersebut pada dasarnya hanya sampai taraf anjuran, namun karena mayoritas anggota PBB yang hadir dalam Sidang Majelis Umum, maka kecenderungannya

negara-negara anggota PBB akan menghormati atau seolah-olah keputusan tersebut mengikat secara hukum. Dengan kata lain apa yang diputus oleh Majelis Umum mengandung opini dunia, yang dapat dijadikan landasan oleh negara anggota PBB untuk menentukan sikap dan mengambil langkah-langkah tertentu.

C. Sekretariat Jendral

Badan utama PBB ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral, yang dipilih dalam sidang Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan.

Sekalipun Sekretaris Jendral ditetapkan sebagai Kepala Tata Usaha atau administrasi dari PBB (pasal 97), namun kenyataannya Piagam juga memberi wewenang lain pada Sekretaris Jendral, yaitu dapat minta perhatian Dewan Keamanan mengenai hal-hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 99).

Karena Penegasan yang demikian itu maka sebenarnya kedudukan Sekretaris Jendral PBB adalah tidak semata-mata sebagai petugas administratif yang terbatas sebagai suatu "*glorified clerk*", satu "*juru tulis yang dimuliakan*", melainkan padanya diletakkan juga suatu tugas yang bersifat politis, baik dalam memberikan jasa baiknya ("*good offices*") dalam tiap pertikaian antar negara. Sebagai seorang pejabat yang dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan un-

tuk tiap masalah ("*any matter*") dan tidak sekedar suatu "pertikaian atau suatu situasi" ("*dispute atau situation*"). Padanya diperlukan kualitas yang paling tinggi di bidang penilaian politis ("*political judgement*"), kebijaksanaan ("*tact*") dan integritas ("*integrity*"). (Roeslan Abdulgani, 1972:37).

Dengan berpijak pada pasal 99, maka sering Sekretaris Jendral mengambil inisiatif untuk turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa persoalan internasional di mana Sekretaris Jendral turut ambil bagian antara lain: dalam krisis Kuba pada tahun 1962, Sekjen PBB membuka kembali sidang Dewan Keamanan yang telah menemui jalan buntu dengan jalan mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Uni Sovyet, yang isinya menganjurkan agar untuk sementara waktu Uni Soviet menghentikan seluruh pengapalan misi ke Kuba dan agar Amerika Serikat juga menghentikan gerakan-gerakan angkatan lautnya sehingga tawar menawar dapat kembali mulai. Demikian juga dalam kasus Vietnam, Sekretaris Jendral mencoba membujuk Pemerintah Amerika Serikat agar memasuki perundingan dengan Vietnam Utara dengan tujuan untuk mengakhiri perang yang semakin meningkat. Dalam hal ini U Thant berhasil mengajak berunding Pemerintah Vietnam Utara dua kali dan Amerika Serikat satu kali, yaitu menge-

nai persiapan ke arah perundingan yang lebih mendalam. Satu lagi contoh, yaitu usaha perdamaian di Kongo dimulai oleh Sekretaris Jendral pada bulan Juni 1960, dengan memanggil Dewan Keamanan untuk bersidang. (James Barros, 1984:139-140, 143). Dalam sengketa kepulauan Malvinas, ternyata Sekretaris Jendral banyak turut ambil bagian.

Demikian gambaran sekilas sebagian konsep atau pemikiran yang terdapat dalam Piagam PBB, dalam usahanya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang apabila kita perhatikan lebih banyak berkaitan dengan masalah mencegah atau mengakhiri sengketa bersenjata atau perang. Namun sebenarnya usaha PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tidak hanya yang ada kaitannya dengan sengketa bersenjata, persoalan-persoalan lain yang juga mengganggu atau mengancam perdamaian dan keamanan internasional, juga menjadi perhatian dari PBB. Seperti masalah Apartheid di Afrika, masalah kelaparan di Etiopia, korban bencana alam, masalah pelanggaran hak asasi di beberapa negara, pengungsian masal dan sebagainya.

III. POLITIK LUAR NEGERI SEBAGAI LANDASAN INDONESIA DALAM MENGGAPAI PERDAMAIAN

Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara, karena politik

luar negeri merupakan bagian dari politik nasional. Demikian juga Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

Dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia antara lain: 1). Politik luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional dan khususnya untuk kepentingan pembangunan, 2). Memurnikan kembali pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif tetapi anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bidang, 3). Turut mengambil bagian dalam usaha-usaha mewujudkan ketertiban dunia, khususnya stabilitas di wilayah Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional. (Kewiraan untuk Mahasiswa, 1984:90).

Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang *bebas aktif* mengandung pengertian; Bebas: dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif: berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasip-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif. (Mochtar Kusumaatmadja, 1983:7). Atas dasar politik yang bebas aktif demikian itulah, maka Indonesia dalam menjalin hubungan atau mengembangkan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan kepentingan nasional demi ter-

ciptanya perdamaian dunia. Juga tidak akan turut pada kelompok-kelompok atau blok-blok tertentu, sebab justru akan menjadikan Indonesia bukan lagi sebagai subyek tetapi sebagai obyek dalam masyarakat internasional. Demikian juga dalam rangka turut mewujudkan perdamaian dunia, tidak hanya menunggu apa yang akan terjadi, akan tetapi aktif memprakarsai menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu perdamaian.

Sikap bebas aktif dari Bangsa Indonesia yang demikian itu, telah berkali-kali ditegaskan oleh beberapa pemimpin negara dalam setiap kesempatan, baik dalam forum nasional maupun forum internasional.

1. Dr. Moh Hatta, di muka Badan Pekerja KNIP, tanggal 2 September 1948: "Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya harus memilih saja antara pro Rusia adan pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Jalan yang harus diambil pemerintah ialah agar Indonesia tidak menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional melainkan harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri." (G. Kartasapoetra, 1984:55).
2. Presiden Suharto, dalam penjelasannya di depan persidangan DPRGR 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa: "politik bebas aktif ialah politik bebas menentukan atau menetapkan pandangan dan sikap kita terhadap masalah-masalah internasional, serta bebas dalam arti lepas daripada ikatan-ikatan kekuatan raksasa dunia yang bertentangan satu sama lain, aktif dan positif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia, ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.
3. Adam Malik, selaku Menteri Luar Negeri, dalam pidatonya di muka Sidang Ma-

jelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1966, telah mengidentifikasikan politik bebas aktif dengan Politik Non Alignment, antara lain dinyatakan: bahwa di bidang hubungan luar negeri pemerintah Indonesia akan terus menjalankan politik non alignmentnya yang tradisional; satu politik bebas aktif dan politik non alignment ini bertujuan mengurangi ketegangan-ketegangan regional dan dunia (untuk mendirikan perdamaian).

4. Presiden Suharto, dalam pidatonya di depan Sidang KTT Non Alignment di Lusaka 19 September 1970 antara lain mengatakan: "Saudara yang bebas aktif itu tidak dapat menerima alignment dengan blok-blok di dunia, ataupun dengan Pakta Militer, yang berhadapan dengan pengelompokan lain berdasarkan rasa atau keyakinan agama. Sebaliknya Indonesia menyambut tiap kerja sama bilateral regional maupun internasional yang berdasarkan pada perdamaian, kemanusiaan yang saling hormat menghormati dan guna mencapai kesejahteraan umat manusia". (G. Kartasapoetra, 1984:56).

Dalam melaksanakan Politik Luar Negerinya, Indonesia berlandaskan pada Pancasila, sebagai landasan idial dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai dasar negara, jiwa dan kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam melaksanakan hubungan luar negerinya, Indonesia harus selalu berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan.

Mengenai *landasan konstitusional* politik luar negeri Republik

Indonesia adalah UUD 1945 berikut Ketetapan MPR. Dalam UUD 1945, bagian Pembukaan dengan jelas menentukan beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Indonesia anti penjajahan/kolonialisme, berusaha menghapuskan setiap bentuk penjajahan/-kolonialisme dari muka bumi (alinea 1),
- 2) bahwa latar belakang perjuangan bangsa Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan keadilan demi kemakmuran bangsa Indonesia (alinea 2). Dengan berlandaskan pada kemerdekaan, rasa persatuan dan kedaulatan, maka Indonesia mengembangkan hubungan antar bangsa.
3. Bangsa Indonesia meyakini adanya kekuatan di luar diri manusia (Indonesia), yang turut menentukan keberhasilan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan (alinea 3).
4. ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia, baik yang bersifat intern, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun yang bersifat ekstern, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia (alinea 4).

Sebagai landasan konstitusional yang lain adalah Ketetapan MPR, khususnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1988. Pada Pola

Umum Pembangunan Jangka Panjang ditentukan bahwa: "dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Dari ketentuan pelaksanaan tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pola Umum setiap Pelita, khususnya dalam Ketetapan MPR tersebut di atas adalah Pelita ke Lima, yang antara lain ditentukan bahwa atas dasar politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif tersebut:

1. harus dilaksanakan secara konsekuen, untuk kepentingan nasional, terutama pembangunan di segala bidang,
2. sesuai dengan kemampuan nasional, perlu ditingkatkan untuk turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam berbagai forum dalam masyarakat internasional,
3. dalam rangka mewujudkan tata dunia baru, perlu meningkatkan kerja sama antar negara,
4. perlu terus diperluas dan ditingkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam rangka memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara, maupun ketahanan regional dalam rangka mewujudkan ZOP-FAN.

Masih dalam Bab yang sama, di bagian lain, khususnya yang menyangkut hubungan luar negeri, ditentu-

kan beberapa arah kebijaksanaan negara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia, dengan mengingat statusnya sebagai anggota masyarakat internasional (lihat GBHN Bab IV). Dengan demikian, bagi setiap penyelenggara negara khususnya, dalam rangka mengadakan hubungan atau kerja sama dalam masyarakat internasional harus selalu memperhatikan sifat-sifat serta landasan politik luar negeri.

IV. AKTIVITAS INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN

Seperti disebutkan di atas, bahwa dengan Politik Bebas Aktifnya Indonesia mengadakan hubungan luar negeri atau hubungan dengan negara lain. Politik Luar Negeri tersebut digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, terutama pembangunan nasional, dan turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tidak memihak pada satu kekuatan atau kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat internasional akan menjadikan Indonesia mempunyai peranan dan diperhitungkan dalam setiap kegiatannya, khususnya dalam operasi perdamaian dunia.

Sebagai langkah nyata dari Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, akhirnya Indonesia bergabung dengan organisasi dunia, yaitu PBB. Dengan masuknya Indonesia dalam tubuh PBB pada tang-

gal 28 September 1950, berarti Indonesia memikul kewajiban untuk melaksanakan tujuan atau cita-cita PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Indonesia selalu siap untuk turut menghilangkan setiap bentuk kolonialisme dan imperialisme dari muka bumi. Sikap yang demikian telah sering diwujudkan dalam masyarakat internasional. Seperti Indonesia menjadi anggota Komite Khusus tentang situasi sehubungan dengan implementasi Deklarasi untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negeri yang terjajah. Sikap RI dalam menjadi sponsor resolusi PBB No. 2878 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971, yang intinya minta kepada Komite 24 agar membuat saran-saran yang konkrit yang dapat membantu Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang tepat sehubungan dengan perkembangan di wilayah penjajahan yang mungkin akan mengancam perdamaian dan keamanan. Resolusi PBB lain yang berkaitan dengan masalah dekolonisasi, di mana Indonesia turut mensponsori antara lain, Resolusi PBB No. 2909 (XXVII) tanggal 20 Nopember 1972, tentang penyeragaman usaha-usaha dekolonisasi, Resolusi PBB No. 2918 (XXVII) tanggal 14 Nopember 1972, yaitu tentang kecaman terhadap Portugal agar menghentikan perang kolonialnya Resolusi PBB No. 2865 (XXVI) tanggal 13 Desember 1971, mengenai Papua dan Wilayah perwalian

New Guinea. (Lukito Santoso, 1986:90-91).

Keinginan Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang damai, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, merupakan satu alasan untuk menerima Timor Timur mengadakan integrasi dengan Indonesia (Prisma, 1986-9: 49). Dengan menerima Timor Timur masuk Indonesia, berarti pula menyelamatkan rakyat Timor Timur dari penjajahan.

Suatu peristiwa yang mampu mengangkat nama Indonesia di dalam forum internasional, khususnya di antara kalangan negara-negara yang baru merdeka, adalah kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini diprakarsai oleh lima negara yaitu, Indonesia, Birma, Sri Lanka, India dan Pakistan, yang didahului oleh Konferensi Colombo pada bulan April 1954 dan Konferensi Bogor dalam bulan Desember 1954 (Pesan Pembaharuan dari Bandung, 1985:10).

Pada konferensi Colombo Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan yang lebih besar dengan negara-negara merdeka Asia dan Afrika dengan tujuan ganda: *pertama*: meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh perang dingin, dan *kedua*: meningkatkan perjuangan melawan penjajahan (Prisma, 1986 No. 9:18). Usul Indonesia yang demikian ini, ternyata mendapat sambutan yang positif dari beberapa negara yang ha-

dir dalam Konferensi Colombo tersebut. Usul yang demikian berlandaskan pada jiwa Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan landasan Politik Luar Negeri Indonesia.

Setelah kurang lebih satu minggu Konferensi Asia-Afrika berlangsung akhirnya berhasil menetapkan 10 prinsip untuk memajukan perdamaian dan kerja sama internasional, atau yang lebih dikenal dengan *Dasa Sila Bandung*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Menghormati hak-hak asasi manusia yang fundamental dan tujuan serta prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa.
3. Pengakuan terhadap persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, besar dan kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau kolektif, yang sejalan dengan Piagam PBB.
6. a. Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan kolektif untuk melayani kepentingan tertentu dari setiap kekuatan besar.
b. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negeri-negeri lain.
7. Menahan diri dari melakukan

tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik setiap negeri.

8. Penyelesaian semua perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, perdamaian, arbitrase atau penyelesaian pengadilan maupun cara-cara lain atas pilihan pihak-pihak bersangkutan yang sejalan dengan Piagam PBB.
9. Memajukan sikap saling menguntungkan dan kerjasama.
10. Menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. (Pesan Pembaharuan dari Bandung 1985:32).

Deklarasi Bandung ini akhirnya telah bergema ke luar wilayah Asia Afrika, dan telah dijadikan sebagai asas hubungan antar negara dalam membina perdamaian dan kerja sama internasional. Dengan Dasa Sila Bandung, menjadikan secara tidak langsung negara-negara yang bukan anggota PBB (Jepang, Kamboja, Laos, Libya dsb.) turut mendukung cita-cita atau tujuan PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebab bila kita perhatikan makna dari 10 prinsip tersebut, sebagian besar sesuai dengan cita-cita atau tujuan dari PBB. Dan baik secara langsung maupun tidak langsung Konferensi Asia Afrika, turut mendorong masuknya negara-negara menjadi anggota PBB.

Banyak komentar yang akhirnya dilontarkan oleh beberapa pi-

hak atas keberhasilan Konferensi Asia Afrika. Prof. Charles L Robertson dalam bukunya *"International Politics Since World War II"* mengatakan: "Tak ada yang lebih baik melambangkan kemunculan negara-negara baru dan peranan yang mereka mainkan di dunia ini dari pada konferensi yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia, 18-24 April 1955" (Pesan Pembaharuan dari Bandung, 1985:32). Perdana Menteri Uni Soviet, Nikolai Bulganin mengatakan bahwa: "Konferensi A-A adalah *a striking demonstration* perasaan bangsa-bangsa waktu itu. Dan penyelesaian damai masalah-masalah internasional seperti yang disebut dalam resolusi Bandung itu dikatakan sebagai suatu *pendekar yang benar* terhadap masalah yang dihadapi dunia. Ketua delegasi Amerika Serikat di PBB, Henry Cabot Lodge, mengatakan: "Konferensi A-A telah menunjukkan *the real way to make true progress towards international peace* (cara nyata untuk membuat kemajuan yang sesungguhnya bagi menuju perdamaian internasional). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, mengatakan: "berkurangnya ketegangan di Timur jauh dewasa ini banyak disebabkan oleh hasil Konferensi A-A". (Pesan Pembaharuan dari Bandung, 1985:33).

Partisipasi Indonesia dalam turut menciptakan perdamaian, terus dilakukan. Beberapa bulan setelah Konferensi A-A tersebut, yaitu sekitar tahun 1956, Indonesia turut ber-

gabung dengan *United Nations Emergency Forces (UNEF)* dengan menyumbangkan sekitar 550 orang anggota militer yang diberi nama Garuda I, dalam rangka pemulihan perdamaian di Timur Tengah, yang diprakarsai oleh PBB. Misi Perdamaian Garuda ini merupakan misi yang pertama dan terus dilakukan dalam setiap kesempatan sesuai dengan kepentingan dan kondisi nasional Indonesia.

Misi Garuda II dan III diberangkatkan untuk membantu persengketaan di Kongo pada sekitar tahun 1960-1961. Misi Garuda IV dan V diberangkatkan untuk membantu persengketaan di Vietnam pada sekitar tahun 1974-1975. Indonesia dalam hal ini turut sebagai anggota dari *International Commission of Control and Supervision (ICCS)*. (Prisma, 1986 No. 9:22-26). Akhirnya untuk kedua kalinya Indonesia menerjunkan Kontingen Garuda, yaitu Garuda VI untuk operasi perdamaian di Timur Tengah pada sekitar tahun 1974 (Lukito Santosa 1986:100).

Dengan adanya perang dingin antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka bagi negara-negara yang baru merdeka, seperti Indonesia, India, Yugoslavia memilih untuk tidak melibatkan diri pada salah satu blok. Namun tidak berarti negara-negara tersebut bersikap pasif atau sebagai "penonton" mereka tetap aktif untuk turut menyelesaikan masalah-masalah internasional. Prinsip yang demikian ini yang kemudian dikenal dengan isti-

lah "non-blok" atau "non-aligned". Untuk Indonesia perkataan non-blok ini tidak lain adalah "politik bebas aktif", sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Indonesia dengan beberapa negara yang berhaluan politiknya sepaham (non-blok, non-aligned), seperti India, Mesir, Yugoslavia dan Ghana, pada Sidang Majelis Umum PBB ke 25, memprakarsai sebuah resolusi mendesak Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita S Krushev agar kembali melanjutkan kontak-kontak mereka untuk meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin antara kedua blok. Tindakan itu dilakukan oleh kelima tokoh politik non-blok itu karena gagalnya pertemuan puncak Kennedy - Krushev di Paris bulan Mei 1960. (Pesan Pembaharuan dari Bandung, 1985:46).

Sebagai tindak lanjut dari lima negara tersebut, berkeinginan untuk menyelenggarakan KTT non blok, yang dalam hal ini pihak Yugoslavia dan Mesir minta supaya Indonesia memprakarsai penyelenggaraan KTT tersebut. Permintaan tersebut disambut baik oleh Indonesia. Sebelum KTT non blok diselenggarakan telah disepakati tentang kriteria negara-negara yang dapat diundang dalam KTT Non Blok, oleh negara-negara yang terlibat dalam persiapan KTT Non Blok. Kriteria tersebut meliputi:

a). Menjalankan politik bebas (independent policy) berdasarkan ko-

eksistensi damai (peaceful coexistence) dan non aligned, b). mendukung gerakan-gerakan pembebasan dan kemerdekaan, c). tidak ikut serta dalam persekutuan militer multilateral seperti NATO, Pakta Warsawa, Seato atau Cento, d). tidak ikut serta dalam persekutuan militer bilateral dengan negara-negara besar dan tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya. (G Kartasapoetra, 1984:54).

Akhirnya KTT Non Blok I dilangsungkan di Beograd, pada awal September 1961. Dengan KTT Non Blok I ini, merupakan awal kelahiran Gerakan Non Blok. Awal kebersamaan dari negara-negara yang tidak ingin menjadi obyek dalam masalah-masalah internasional, namun sebagai subyek yang aktif dalam memecahkan masalah-masalah internasional menuju perdamaian dunia. Setelah KTT Non Blok I, yang ternyata mampu memajukan kerja sama antar negara atas persamaan hak dan derajat, menjadikan dipandang perlu untuk diadakan KTT Non Blok berikutnya. Dalam setiap KTT Non Blok Indonesia selalu ambil bagian atau aktif memecahkan masalah-masalah internasional yang mengarah pada perdamaian internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, secara garis besar dapat dilihat keterlibatan Indonesia dalam berbagai Komite atau Konferensi, yang antara lain: Konferensi Nega-

ra-negara Islam, gerakan non blok dan PBB. Dalam organisasi dunia ini, mengenai masalah-masalah perdamaian dunia, Indonesia ikut serta dalam berbagai komite, konferensi dan lain-lain, seperti Komite ad hoc Samodra Hindia, United Nations Dissarmament Conference, Panitia Persiapan Konferensi mengenai hubungan pelucutan senjata dan pembangunan, kelompok Ahli PBB untuk studi Dampak Ekonomi dan Sosial dari perlombaan senjata, kelompok ahli PBB mengenai Pengurangan Anggaran militer, kelompok ahli PBB untuk studi perlombaan senjata konvensional, kelompok kerja senjata kimia dari Konferensi pelucutan senjata di Jenewa, komite ad hoc mengenai sistem keamanan kolektif, komite dekolonisasi, komite khusus anti apartheid dan sebagainya (Prisma, 1986 No. 9:25).

Kerjasama Indonesia dengan negara lain disamping sifatnya lintas benua, juga dikembangkan kerjasama yang sifatnya regional. Seperti bergabungnya antara Malaysia, Philipina dan Indonesia dalam MAPHILINDO. Kerjasama ini ternyata kurang membawakan hasil yang berarti bagi masing-masing pihak, dan bahkan organisasi ini kandas di tengah jalan. Untuk itu maka dicari alternatif kerjasama regional lain.

Kemudian pada tahun 1967, lima negara di kawasan Asia Tenggara bergabung membentuk suatu organisasi yang diberi nama ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya De-

klarasi Bangkok 1967, oleh Indonesia, Malaysia, Philipina, Muangthai dan Singapura. 17 tahun kemudian menyusul Brunai bergabung dan menjadi anggota ASEAN. Diharapkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara mau menjadi anggota ASEAN.

Pada awal pembentukannya, ASEAN dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama Ekonomi dan sosial budaya. Hal ini dilandasi oleh situasi-situasi; baru rujuknya antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura memisahkan diri dari federasi Malaysia, Philipina dan Thailand masih tergabung dalam SEATO, serta masih adanya masalah Sabah antara Malaysia dengan Philipina. Empat tahun kemudian, ASEAN meningkatkan bentuk kerjasamanya, yaitu bidang keamanan, dengan ditandatanganinya "Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau sering dikenal Deklarasi ZOPFAN, di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Nopember 1971.

Dengan Deklarasi Kuala Lumpur, negara-negara anggota ASEAN, berkeinginan untuk meredakan ketegangan internasional dan untuk mencapai suatu perdamaian yang abadi di kawasan Asia Tenggara. Karena ASEAN didirikan juga untuk mengabdikan kepada pemeliharaan perdamaian, kemerdekaan dan kebebasan yang utuh.

Kemudian pada KTT ASEAN I di Bali, berhasil pula ditandatangani 3 dokumen penting, yang salah satunya adalah "Treaty of Ametty

and Cooperation in Southeast Asia". Dalam Mukadimah perjanjian tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa, para anggota ASEAN menyadari bahwa di antara mereka adanya ikatan sejarah, geografis dan kebudayaan, sehingga perlu membina perdamaian dan stabilitas wilayah untuk meningkatkan ketahanan regional berdasarkan Piagam PBB, Dasasila Bandung, Deklarasi ASEAN dan Deklarasi Kuala Lumpur. Dari kesepakatan ini nampak dengan jelas bahwa Indonesia di kawasan regional juga aktif untuk turut menciptakan perdamaian.

Dengan berlandaskan beberapa prinsip dasar tersebut di atas, menjadikan negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama di antaranya, demi terwujudnya perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Beberapa tindakan dari negara anggota ASEAN dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara antara lain membantu mengatasi pengungsian orang-orang Vietnam. Indonesia menyediakan Pulau Galang, Philipina menyediakan Pulau Tara dan Malaysia menyediakan Pulau Bidog, sebagai pusat pemrosesan sebelum diberangkatkan ke negara ketiga.

Salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh ASEAN hingga kini adalah sengketa di Kamboja. Akibat tindakan Vietnam mengadakan penyerbuan militer ke wilayah Kamboja, yang akibat selanjutnya akan mengganggu perdamaian, ke-

amanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Beberapa usaha ASEAN telah ditempuh, dalam rangka turut membantu penyelesaian sengketa di Kamboja, baik dalam forum regional maupun forum global.

Dalam rangka membantu penyelesaian sengketa Kamboja, pada tahun 1984 para Menlu ASEAN memberi mandat pada Menlu RI sebagai "interlocutor" ASEAN untuk berbicara dengan Vietnam. Sebagai tindak lanjut, kemudian Menlu RI (waktu itu Mochtar Kusumaatmadja) pada bulan Juli 1987 di Ho Chi Minh City mengadakan pertemuan dengan Menlu Vietnam, yang hasilnya pihak Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal (*cocktail party*) dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan informal tersebut akhirnya diselenggarakan di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebutan Jakarta Informal Meeting (JIM), yang meliputi JIM I dan JIM II dan direncanakan pada waktu mendatang diadakan JIM Plus di Jakarta. Tentang akan diadakannya JIM Plus tersebut ternyata mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Dengan kerja sama regional semacam ini, pada prinsipnya dapat membantu proses perdamaian dunia, dengan kerja sama regional sengketa antar negara dapat dilokalisasi atau dibatasi ruang lingkupnya. Dan Indonesia tetap pada pendiri-

annya dalam mengadakan kerja sama, baik dalam skala global maupun regional, tidak mau dikendalikan oleh adanya kekuatan dari luar, lebih-lebih negara adikuasa. Dengan kerjasama regional ketahanan dan stabilitas wilayah masing-masing negara akan lebih terjamin.

Dari berbagai bentuk kerja sama maupun aktivitas Indonesia tersebut di atas, tentu masih banyak kerjasama atau aktivitas yang pernah dilakukan oleh Indonesia, dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini ada dua hal yang ingin dikemukakan. Pertama: bahwa dengan berlandaskan politik luar negeri, maka peranan Indonesia dalam turut menciptakan perdamaian dunia tidak perlu diragukan lagi dan usaha semacam itu masih terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dalam rangka melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945. Kedua: terlepas dari materi dalam tulisan ini, bahwa karya ilmiah ini dibuat untuk menghormati Guru Besar penulis, yaitu Prof. DR. RM. Sudikno Mertokusumo, SH. yang telah purna tugas (secara administratif). Tak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembekalan pengetahuan dalam bidang Hukum yang diberikan beliau kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Nasution, Drs. Dipl. Ir., 1984: *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*, Remadja karya, Bandung.
- G. Kartasaputro & RG. Kartasaputro, SH., 1984: *Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional*, Sumur Bandung, Jakarta.
- James Barros, 1984: *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kantor Penerangan PBB: *Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional*, Jakarta.
- Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, 1985: *Pesan Pembaha-*

- ruan dari Bandung*, Jakarta.
- Lemhanas, 1984: *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta.
- LUkito Santoso, 1986, *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajahan Polemologi)*, UI Pers, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, Prof. DR. SH., 1983: *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Alumni, Bandung.
- Ruslan Abdulgani, H., DR., 1972: *25 Tahun Indonesia - PBR*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 1989: Analisis No. 1 Januari-Februari, CSIS, Jakarta.
- _____, 1986: Prisma No. 9, Jakarta.